



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN FISKAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANDE PUTU OKA KUSUMAWARDANI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 767174

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.178.574.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.378.574.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 355.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLA ALTIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 145.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 2.279.709.538**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.966.575.508**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.924.859.046**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.924.859.046

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.